



URGENSI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM MENINGKATKAN MUTU PERGURUAN TINGGI

Oleh

Yoga Budi Bhakti^{1,2}, Achmad Ridwan³, Riyadi⁴

¹⁾³⁾⁴⁾Universitas Negeri Jakarta

²⁾Universitas Indraprasta PGRI

bhaktiyoga.budi@gmail.com^{1,2}

diterima 05 Juli 2022, direvisi 14 Juli 2022, diterbitkan 31 Agustus 2022

Abstract

Higher education quality assurance is aimed at quality education. Universities must systematically carry out the quality assurance process through the Higher Education Quality Assurance System and refer to the National Higher Education Standards. There are two quality assurance systems in higher education, namely; internal quality assurance and external quality assurance. The internal quality assurance system is a systematic activity carried out internally, independently and autonomously to improve the quality of education consistently and sustainably. Meanwhile, the external quality assurance system is an assessment activity carried out by outside units to determine the feasibility of universities. This study aims to clearly describe the quality assurance system at the university level. The approach used in this study is qualitative with literature review sourced from articles in journals. The results of this study are related to policies and procedures for quality assurance measures internally and externally at the university level. With the clarity of the flow of the quality assurance system, it is hoped that universities can implement it well.

Keywords: *Quality Assurance, Internal Quality Assurance, External Quality Assurance*

Abstrak

Penjaminan mutu perguruan tinggi ditujukan untuk pendidikan mutu. Perguruan tinggi harus secara sistematis melaksanakan proses penjaminan mutu melalui Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dan mengacu Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sistem penjaminan mutu pada perguruan tinggi ada dua, yaitu; penjaminan mutu internal dan penjaminan mutu eksternal. Sistem penjaminan mutu internal adalah kegiatan yang sistematis yang dilakukan secara internal, mandiri dan otonom untuk meningkatkan mutu pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan. Sedangkan Sistem Penjaminan mutu eksternal merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan unit luar untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan secara jelas tentang system penjaminan mutu di tingkat perguruan tinggi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini secara kualitatif dengan literature review yang bersumber dari artikel di dalam jurnal. Hasil penelitian ini yaitu terkait kebijakan dan prosedur langkah penjaminan mutu secara internal dan eksternal di tingkat perguruan tinggi. Dengan

jelasnya alur sistem penjaminan mutu diharapkan Perguruan Tinggi dapat mengimplementasikannya dengan baik.

Kata Kunci: Penjaminan Mutu, Penjaminan Mutu Internal, Penjaminan Mutu Eksternal

I. PENDAHULUAN

Pemerintah menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagai penjaminan mutu perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi terdiri dari dua kategori yaitu penjaminan mutu yang dilakukan secara internal disebut Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan penjaminan mutu yang dilakukan secara eksternal yang disebut dengan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau yang lebih dikenal dengan istilah Akreditasi. Sistem penjaminan mutu internal dan eksternal di Pendidikan Tinggi sebaiknya dapat diimplementasikan dengan baik sesuai alur yang sudah ditetapkan. Penjaminan mutu sebagai alat *quality control* dalam sebuah lembaga, termasuk lembaga pendidikan (Fadhli, 2020; Prasetyo & Husaini, 2021). Perguruan Tinggi yang bermutu dapat dikatakan bahwa sistem penjaminan mutu secara internal dan eksternal telah dilaksanakan oleh lembaga tersebut.

Perguruan tinggi merupakan laboratorium seluruh ilmu pengetahuan yang hasilnya diimplementasikan kepada masyarakat, oleh karena itu perguruan tinggi menjadi ujung tombak dalam peningkatan perkembangan masyarakat (Lian, 2019; Binangkit & Siregar, 2021). Hal ini terjadi karena perguruan tinggi memiliki kewajiban yang disebut dengan tri darma. Tri Darma meliputi kegiatan pendidikan atau pengajaran, penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga darma tersebut memiliki keterkaitan satu sama lainnya, dan juga dapat dijadikan indikator mutu suatu perguruan tinggi.

Bagi Negara berkembang, pendidikan tinggi memiliki peranan yang penting. Oleh karena itu Negara

membutuhkan Pendidikan tinggi yang berkualitas (Fadhli, 2020). Peranan pendidikan tinggi bagi kemajuan sebuah Negara diantaranya meliputi 1) pendidikan tinggi harus berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia dan ekonomi pada sebuah Negara; 2) berkontribusi kepada demokrasi sebuah Negara dalam pembangunan masyarakat dan politik; 3) Berkontribusi dalam menentukan identitas suatu bangsa, 4) Memperkuat posisi Negara dalam kancah dunia internasional (Matei & Iwinska, 2016).

Pelaksanaan penjaminan mutu secara efektif oleh membawa dampak yang positif secara langsung maupun tidak langsung pada lembaga pendidikan tinggi tersebut (Alam, 2016; Kodrat, 2019). Dampak langsung dari pelaksanaan penjaminan mutu yang efektif diantaranya transparansi dalam tata kelola, pembelajaran berlangsung secara efektif, adanya kenaikan peringkat atau status. Sementara dampak tidak langsung meliputi motivasi serta harmonisasi yang baik antar lembaga.

Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan tinggi merupakan salah satu pelaksanaan penjaminan mutu yang efektif. Penjaminan mutu internal memiliki beberapa fungsi diantaranya menunjang target dalam bidang akademik (Akareem & Hossain, 2016; Ali, Zhou, Hussain, Nair, & Ragavan, 2016). Sementara itu, penjaminan mutu eksternal dilakukan memberikan peringkat atau akreditasi terhadap lembaga yang dievaluasi. Tujuan dari penjaminan mutu eksternal untuk menggambarkan mutu suatu lembaga dan menginformasikan kepada public maupun stakeholder (Bendermacher, Wolfhagen & Dolamns, 2017; Toquero, 2020).

Pelaksanaan penjaminan mutu secara internal yang dilakukan oleh

perguruan tinggi disebut dengan audit mutu internal atau sistem penjaminan mutu internal. Kegiatan audit mutu internal yang dilakukan oleh perguruan tinggi memiliki tujuan untuk menjamin mutu lembaga dilihat dari pelaksanaan kegiatan perguruan tinggi dalam bidang Tri Dharma. Selain itu penjaminan mutu internal juga berfungsi untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi tersebut (Arifudin, 2019). Penjaminan mutu internal di perguruan tinggi dijalankan melalui empat tahapan yakni tahap proses pelaksanaan penjaminan mutu internal, tahap evaluasi diri, tahap audit internal, serta tahap tindakan koreksi (Sulaiman & Wibowo, 2016).

Mutu pada sebuah perguruan tinggi merupakan refleksi dari ketercapaian visi, misi, tujuan yang memiliki kesesuaian dengan kompetensi lulusan, kebijakan mutu akademik yang telah ditetapkan melalui penyelenggaraan kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi (Fithrah, 2018). Lembaga penjaminan mutu perguruan tinggi harus memastikan bahwa kegiatan audit mutu internal memiliki tujuan untuk menjamin mutu pendidikan dengan melihat kegiatan Tri darma perguruan tinggi (Fitriani & Kemenuh, 2021).

Sebagian besar perguruan tinggi lebih memprioritaskan kegiatan akreditasi atau audit mutu secara eksternal dibandingkan kegiatan audit mutu secara internal (Bancin, 2017; Suban, 2021). Padahal antara audit mutu secara internal maupun eksternal memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Proses audit mutu internal sebenarnya mempersiapkan lembaga dalam menghadapi audit mutu secara eksternal. Dengan meningkatkan mutu internal melalui SPMI yang dilaksanakan oleh lembaga penjamin mutu lembaga terlebih dahulu, dapat dipastikan proses akreditasi atau audit mutu eksternal juga akan baik (Reknati, 2019; Papatungan, Ansar & Mas, 2021).

Tulisan ini akan difokuskan pembahasannya untuk membahas implementasi kegiatan penjaminan mutu

perguruan tinggi secara internal maupun eksternal sebagai upaya dalam meningkatkan mutu perguruan tinggi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur review dengan mengumpulkan artikel dari jurnal nasional maupun internasional tentang pelaksanaan penjaminan mutu internal dan eksternal di perguruan tinggi.

II. PEMBAHASAN

Pembahasan tentang mutu merupakan topik yang menarik karena tidak sederhana dan mudah dan yang membuat lebih menarik lagi adalah mutu bersifat abstrak. Jika kita berbicara mutu, maka kita akan menjelaskan ukuran kebaikan dari sebuah produk dengan melihat kualitas. Jika membicarakan mutu pada lembaga Perguruan Tinggi maka akan terakit dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau yang lebih dikenal dengan akreditasi. Peningkatan mutu dari lembaga pendidikan tinggi terkait erat dengan komitmen, prioritas dan yang utama adalah kebijakan (Oktaviani & Santoso, 2018; Fitrah, 2018; Dani, Hikmawati & Fathan, 2019).

Dalam konteks lembaga pendidikan tinggi, perguruan tinggi yang bermutu jika memenuhi kebutuhan di dalam masyarakat, memberikan kontribusi yang positif dalam perkembangan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan serta mencetak generasi yang bermanfaat bagi masyarakat bangsa dan negara. Untuk meningkatkan mutu Perguruan Tinggi dibutuhkan dua hal yaitu rencana kegiatan yang sistematis dan memiliki komitmen dalam mengelola perguruan tinggi mengacu kepada visi, misi dan tujuan yang sudah ditetapkan (Fitrah, 2018). Selain itu juga terdapat dua hal yang dijadikan sebagai alat dalam menganalisis perguruan tinggi yaitu, (1) *quality in fact* yaitu mutu yang berdasarkan kepada capaian yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan, dan (2) *quality in*

perception yaitu mutu lulusan yang dikukur oleh pengguna lulusan, masyarakat maupun stakeholder lainnya (Lubis, Dewi, Sihotang & Siburian, 2020; Nofrita, Rosyidi & Kamati, 2019).

Untuk mencapai hal tersebut, setiap lembaga pendidikan tinggi sebaiknya dibantu oleh beberapa lembaga internal didalam perguruan tinggi tersebut. Seperti Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Gugus Penjamin Mutu (GPM) serta Unit Penjamin Mutu (UPM) yang masing-masing secara berurutan berada di tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi. Lembaga penjaminan mutu inilah yang bertugas untuk memastikan bahwa proses pembelajaran diperguruan tinggi sudah sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan telah sesuai dengan standar yang telah disepakati dan diberlakukan. Dengan memiliki lembaga yang konsentersasi pada mutu di Perguruan Tinggi, maka evaluasi pengembangan atau pelaksanaan penjaminan mutu dapat berjalan dengan baik. Konsep penjaminan mutu PT mengacu kepada empat pandangan berikut, yaitu (1) perguruan tinggi bertanggung jawab terhadap mutu pendidikan; 2) memiliki dua kegiatan inti dalam menjamin mutu perguruan tinggi; 3) mutu pendidikan perguruan tinggi harus senantiasa ditingkatkan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin dan menjaga mutu perguruan tinggi tetap baik; 4) stakeholder berharap mutu lulusan dapat diterima oleh masyarakat.

2.1 Penjaminan Mutu Internal

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan isi dari Pasal 53 UU Dikti, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas SPMI dan SPME atau akreditasi. SPMI merupakan kegiatan penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi secara mandiri dan otonom bebas dari campur tangan pihak lain untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan. Oleh karena itu, setiap lembaga pendidikan

tinggi dapat mengembangkan sistem audit mutu internalnya berdasarkan sejarah dan filosofis pendirian perguruan tinggi.

Kebijakan dan implementasi Audit Mutu Internal yang merupakan audit mutu yang dilaksanakan secara mandiri oleh perguruan tinggi tanpa campur tangan pihak manapun (Arifudin, 2019; Sulaiman & Wibowo, 2016; Fadhli, 2020). Lembaga audit mutu internal di perguruan tinggi memiliki tanggung jawab dalam pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pendidikan di perguruan tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya lembaga audit mutu internal memiliki pedoman dalam pelaksanaan tugasnya sehingga kegiatan audit mutu internal dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Inti dari Sistem penjaminan mutu internal yaitu tersedianya berbagai Standar yang dapat tersusun dalam sebuah Dokumen Standar yang meliputi yaitu Formulir SPMI, Manual SPMI, dan Kebijakan SPMI. Implementasi Standar dalam SPMI terdiri atas sebuah siklus yang disebut PPEPP yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan Standar.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menjadi terobosan dalam rangka pengelolaan perguruan tinggi, dengan sistem ini membuat perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang masih berkembang memiliki kesempatan untuk mejadi lebih baik lagi berdasarkan hasil temuan-temuan audit mutu internal. Perbaikan yang dilakukan oleh perguruan tinggi negeri maupun swasta diharapkan dapat meningkatkan mutu perguruan tinggi pada umumnya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem penjaminan mutu internal merupakan proses untuk melakukan penetapan dan pemenuhan standar mutu pendidikan perguruan tinggi yang dilakukan secara mandiri tanpa campur tangan pihak manapun dan dilaksanan secara konsisten dan

berkelanjutan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi.

2.2 Penjaminan Mutu Eksternal

Lembaga pendidikan yang berkualitas harus mendapatkan pengakuan secara legal dari lembaga penjamin mutu yang tersertifikasi. Penjaminan mutu secara eksternal sangat penting dilakukan oleh lembaga perguruan tinggi untuk melihat raihannya atau capaian lembaga perguruan tinggi dalam memenuhi standar mutu yang telah disepakati dan ditetapkan. Kegiatan penjaminan mutu secara eksternal juga dilakukan sebagai pertanggungjawaban pengelola lembaga perguruan tinggi kepada stakeholder yang terkait. Penjaminan mutu eksternal merupakan kegiatan penentuan tingkatan atau akreditasi terhadap lembaga perguruan tinggi berdasarkan acuan atau pedoman

yang telah ditetapkan (Riset & Pendidikan Tinggi, 2016).

Tasopoulou & Tsiotras (2017) mendefinisikan penjaminan mutu eksternal sebagai *the process of ranking by comparing on standard criteria*. Tujuan penjaminan mutu eksternal adalah untuk membantu perguruan tinggi serta memberikan rekomendasi dan saran untuk perbaikan menjadi lebih baik lagi.

Lembaga pendidikan tinggi menetapkan delapan standar dalam pelaksanaan penjaminan atau audit mutu eksternal. Delapan standar yang ditetapkan terintegrasi dengan standar lainnya. Untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dalam penjaminan mutu eksternal, maka delapan standar ini harus dipenuhi. Berikut penjelasan lebih lanjut dalam tabel 1.

Tabel 1. Delapan Standar Penjaminan Mutu Eksternal

Standar	Isi	Penjelasan
Pertama	Menggunakan prosedur audit mutu internal	Pelaksanaan penjaminan mutu eksternal dapat mengadopsi langkah penjaminan mutu secara internal sehingga terjadi sinkronisasi.
Kedua	Mengembangkan langkah atau proses penjaminan mutu eksternal	Dalam penjaminan mutu eksternal harus dikembangkan langkah yang jelas dari mulai proses sampai tahap publikasi ke stakeholder atau public. Oleh karena itu dibutuhkan instrument dalam prosesnya.
Ketiga	Menetapkan kriteria pengambilan putusan	Kriteria ini harus diberitahukan kepada lembaga yang akan dievaluasi
Keempat	Pelaksanaan proses penjaminan mutu harus sesuai dengan tujuan yang ditetapkan	Penjaminan mutu yang baik, efektif dan efisien tidak boleh keluar dari tujuan awal dalam prosesnya.
Kelima	Membuat pelaporan yang sederhana dan mudah dipahami	Pelaporan hasil penjaminan mutu dibuat sederhana dan mudah dipahami oleh pihak stakeholder maupun public. Hasil pelaporan dapat berupa saran maupun rekomendasi.
Keenam	Menetapkan prosedur tindak lanjut proses penjaminan mutu	Hasil rekomendasi dari proses audit harus ditindaklanjuti oleh stakeholder.
Ketujuh	Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin atau berkala	Monev dilakukan secara rutin untuk menjamin peningkatan mutu lembaga pendidikan tinggi tersebut
Kedelapan	Melakukan analisis menyeluruh	Hasil audit berupa saran maupun rekomendasi serta proses harus dilakukan analisis menyeluruh untuk proses audit berikutnya

Sumber (ENQA, 2009)

Untuk menjaga kelancaran proses penjaminan mutu eksternal serta menjamin asas keterbukaan maka perlu dilaksanakan oleh asesor yang memiliki kapabilitas yang ahli dalam bidangnya atau memiliki kompetensi yang memadai. Kompetensi yang harus dimiliki ialah kompetensi professional, memiliki kemampuan memeriksa secara detail dan sistematis, memiliki kemampuan menganalisis situasi, memiliki kemampuan manajerial serta memiliki kompetensi interpersonal (Cheung, 2015)

2.3 Dampak Penjaminan Mutu Terhadap Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Tinggi

Lembaga pendidikan yang baik akan terus berupaya dalam memperbaiki hal-hal yang masih kurang dengan melakukan inovasi agar mutu pada lembaganya dapat meningkat. Inovasi perbaikan secara berkelanjutan dibutuhkan agar dapat meningkatkan mutu lembaga pendidikan tinggi khususnya.

Mutu dapat dilihat dari dua sisi yaitu kualitas berhubungan dengan kepuasan pengguna serta mencakup pada proses dan hasil (Goetsch & Davis, 2014). *quality meets customer quality not only products and services* (Oakland, 2014). Mendefinisikan istilah mutu dalam pendidikan memerlukan pemikiran yang mendalam. Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut;

Tabel 2. Definisi Mutu

1	Mutu merupakan ukuran yang lebih dari standar. Lembaga pendidikan bermutu baik harus mencerminkan kualitas yang baik
2	Mutu merupakan peningkatan kualitas yang dilakukan secara konsisten.
3	Mutu harus memiliki tujuan. Oleh karena itu lembaga pendidikan tinggi yang bermutu dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang sudah ditetapkan.

4	Mutu lembaga pendidikan tinggi tidak dinilai dalam bentuk materi uang tetapi dilihat pada capaian prestasi yang telah diraih
5	Pendidikan tinggi yang bermutu harus bertransformasi dan beradaptasi terhadap segala perubahan

Terdapat empat prinsip dalam pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi yaitu (1) terdapat Lembaga Penjaminan Mutu di perguruan tinggi baik di tingkat universitas, fakultas maupun program studi; (2) adanya laporan evaluasi yang diserahkan oleh unit atau lembaga yang akan di evaluasi; (3) pelaksanaan asesmen lapangan dilakukan oleh lembaga yang melakukan audit; dan (4) adanya laporan hasil evaluasi yang disampaikan ke public (Bernhard, 2012). Untuk mencapai mutu pendidikan tinggi yang baik, maka perlu dilaksanakan proses penyelenggaraan di pendidikan tinggi sesuai pedoman dan mekanisme yang sudah ditetapkan.

Xiao & Zhang, (2017) menjelaskan terkait mekanisme sistem penjaminan mutu yang dilakukan yaitu Pertama, perguruan tinggi harus memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa yang memiliki prestasi atau bakat istimewa yang dimilikinya; Kedua, mendapat bantuan finansial dari pemerintah pusat maupun daerah; Ketiga, memberikan kebebasan dalam mengembangkan kurikulum maupun program lainnya yang mendukung kepada kompetensi lulusan.

Penjaminan mutu yang baik harus dilakukan secara sistematis. pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan atau kaidah yang telah disepakati. Tahapan dalam penjaminan mutu memiliki empat fase, dimana empat fase ini disesuaikan dengan masalah yang sering dialami oleh perguruan tinggi (Bernhard, 2012). Berikut empat fase yang dikembangkan oleh Jeliaskova dan Westerheijden yaitu, Fase 1 adalah Masalah; Fase 2 adalah Peran jaminan kualitas; Fase 3 adalah Basis

Informasi; dan Fase 4 adalah Sidat evaluasi eksternal. Setiap fase memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda dalam pelaksanaan penjaminan mutu. Tujuan pelaksanaan penjaminan mutu di lembaga pendidikan tinggi pada dasarnya memiliki tujuan, yaitu *communication, innovation, improvement, control and motivation* (Rosa, 2014). Tujuan dari Penjaminan mutu secara internal maupun eksternal akan tercapai dengan baik jika stakeholder atau pemangku kepentingan di pendidikan tinggi tersebut memberikan dukungan serta terjalannya kerja sama antar unit dibawahnya. Apabila kedua hal ini terjadi maka penjaminan mutu yang efektif dan efisien dapat diwujudkan (Seyfried & Pohlenz, 2018). Untuk menjaga kualitas penjaminan mutu yang baik diperlukan budaya mutu yang baik dalam perguruan tinggi tersebut. Hasil dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa mutu lembaga akan terus meningkat jika di lembaga pendidikan tinggi tersebut memiliki budaya mutu yang baik. Budaya mutu yang baik diperoleh dari penjaminan mutu yang baik secara internal maupun eksternal (Hildesheim & Sonntag, 2020; Yingqiang & Yongjian, 2016). Budaya mutu menitikberatkan kepada peningkatan kualitas yang konsisten dan berkelanjutan serta dukungan dari stakeholder dalam pelaksanaan penjaminan mutu (Dzimińska et al., 2018).

III. SIMPULAN

Perkembangan suatu bangsa ditentukan pada kualitas yang baik pada pendidikan tinggi pada Negara tersebut. Lembaga pendidikan tinggi harus senantiasa meningkatkan kualitas mutu pendidikan secara berkelanjutan, melakukan perubahan dan adaptasi yang cepat pada perubahan yang terjadi. Selain itu harus mendapatkan dukungan dari stakeholder agar lembaga pendidikan tinggi ini memiliki budaya mutu yang

baik. Untuk memperoleh mutu yang baik, maka Perguruan Tinggi harus menjalankan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Selain itu juga harus dilakukan monitoring dan evaluasi serta tahapan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) dalam pelaksanaan penjaminan mutu, agar tidak melenceng dari tujuan yang sudah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akareem, H. S., & Hossain, S. S. (2016). Determinants of education quality: what makes students' perception different?. *Open review of educational research*, 3(1), 52-67.
- Alam, S. (2016). Pengaruh Komunikasi, Motivasi, dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. *Katalogis*, 2(1).
- Ali, F., Zhou, Y., Hussain, K., Nair, P. K., & Ragavan, N. A. (2016). Does higher education service quality effect student satisfaction, image and loyalty? A study of international students in Malaysian public universities. *Quality assurance in education*.
- Arifudin, O. (2019). Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 3(1), 161-169.
- Bancin, A. (2017). Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Indonesia*, 9(1), 1-12.
- Bendermacher, G. W. G., Wolfhagen, I. H. A. P., & Dolmans, D. H. J. M. (2017). Unravelling quality culture in higher education: a realist review. *Higher education*, 73(1), 39-60.
- Bernhard, A. (2012). *Quality Assurance in an International Higher Education Area*. Wiesbaden: VS Verlag für.
- Binangkit, I. D., & Siregar, D. I. (2020). Internasionalisasi dan reformasi perguruan tinggi: Studi kasus pada

- lembaga pendidikan tinggi Muhammadiyah. *JDMP (Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan)*, 4(2), 131-138.
- Cheung, J. C. M. (2015). Professionalism, Profession and Quality Assurance Practitioners in External Quality Assurance Agencies in Higher Education. *Quality in Higher Education*, 21(2), 151-170.
- Dani, A. A., Hikmawati, A., & Fathan, F. (2019). Implementasi digital assurance dalam peningkatan mutu pendidikan di sastra Inggris IAIN Surakarta. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 5(1), 1-9.
- David L. Goetsch dan Stanley Davis. (2014). *Quality Management: Introduction to Total Quality Management for Production* (Pearson Ne). Edinburgh: Pearson.
- Dzimińska, M., Fijałkowska, J., & Sułkowski, Ł. (2018). Trust-based quality culture conceptual model for higher education institutions. *Sustainability*, 10(8), 2599.
- ENQA (ed.). (2009). *tandards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (3rd Ed)*. Helsinki: European Association for Quality Assurance in Higher Education.
- Fadhli, M. (2020). Sistem Penjaminan Mutu Internal Dan Eksternal Pada Lembaga Pendidikan Tinggi. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 171-183.
- Fitrah, M. (2018). Urgensi sistem penjaminan mutu internal terhadap peningkatan mutu perguruan tinggi. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 4(1), 76-86.
- Fitriani, L. P. W., & Kemenuh, I. A. A. (2021). Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Melalui Implementasi Manajemen Mutu Terpadu Dalam Pendidikan. *PINTU: Jurnal Penjaminan Mutu*, 2(2).
- Hildesheim, C., & Sonntag, K. (2020). The Quality Culture Inventory: a comprehensive approach towards measuring quality culture in higher education. *Studies in Higher Education*, 45(4), 892-908.
- Kodrat, D. (2019). Urgensi perubahan pola pikir dalam membangun pendidikan bermutu. *Jurnal Kajian Peradaban Islam*, 2(1), 1-6.
- Lian, B. (2019, July). Tanggung jawab Tridharma perguruan tinggi menjawab kebutuhan masyarakat. In *Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*.
- Lubis, R., Dewi, R., Sihotang, D. O., & Siburian, P. (2020, November). Urgency of Internal Quality Guarantee Sistem to Improve Higher Education Quality. In *The 5th Annual International Seminar on Transformative Education and Educational Leadership (AISTEEL 2020)* (pp. 256-260). Atlantis Press.
- Mas, S. R. (2017). *Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Matei, L., & Iwinska, J. (2016). Quality assurance in higher education: A practical handbook. *Budapest: Central European University*.
- Nofrita, D., Rosyidi, U., & Karnati, N. (2019). Urgency of Internal Academic Quality Audit Policy at Higher Education. *International Journal for Educational and Vocational Studies*, 1(4), 290-293.
- Oakland, J. S. (2014). *Total Quality Management and Operational Excellence: Text with cases* (4th ed.). New York: Routledge.
- Oktaviani, M. H., Santoso, A., Kp, S., & Kep, M. (2018). Literature Review: Peningkatan Mutu Institusi Pendidikan Tinggi Melalui Pengembangan Sumber Daya Manusia (Literature Review: Improving The Quality Of Higher Education Institutions Through

- Human. *Jurnal Keperawatan dan Kesehatan MEDISINA AKPER YPIB Majalengka# Volume IV Nomor*, 1.
- Paputungan, I., Ansar, A., & Mas, S. R. (2021). Keefektifan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. *PEDAGOGIKA*, 77-92.
- Prasetyo, M. A. M., & Husaini, H. (2021). Efektivitas Pengelolaan Mutu Dosen Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri. *IMPROVEMENT Jurnal Ilmiah untuk peningkatan mutu manajemen pendidikan*, 8(1), 29-39.
- Reknati, P. (2019). Implementasi Sistem Penjamin Mutu Internal dalam Meningkatkan Mutu di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. *Meteor STIP Marunda*, 12(1), 73-81.
- Rosa, M. J. (2014). The Academic Constituency. In M. J. Rosa & A. Amaral (Eds.), *Quality Assurance in Higher Education: Contemporary Debates* (pp. 181–206). Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Scharager Goldenberg, J. (2018). Quality in Higher Education: The View of Quality Assurance Managers in Chile. *Quality in Higher Education*, 24(2), 102–116.
- Suban, A. (2021). Sistem Penjaminan Mutu Dan Pengawasan Pendidikan Tinggi. *al-fikrah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 8(2), 79-94.
- Sulaiman, A., & Wibowo, U. B. (2016). Implementasi sistem penjaminan mutu internal Sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan di Universitas Gadjah Mada. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 4(1), 17-32.
- Tasopoulou, K., & Tsiotras, G. (2017). Benchmarking towards excellence in higher education. *Benchmarking: An International Journal*.
- Toquero, C. M. (2020). Challenges and opportunities for higher education amid the COVID-19 pandemic: The Philippine context. *Pedagogical Research*, 5(4).
- Xiao, H., & Zhang, X. (2017). Assuring Quality in Transnational Higher Education: A Case Study of Sino-Foreign Cooperation University in China. In D. E. Neubauer & C. Gomes (Eds.), *Quality Assurance in Asia-Pacific Universities: Implementing Massification in Higher Education* (pp. 55–70). Cham: Palgrave Macmillan.
- Yingqiang, Z., & Yongjian, S. (2016). Quality assurance in higher education: Reflection, criticism, and change. *Chinese Education & Society*, 49(1-2), 7-19.